

BAB 1

PENDAHULUAN

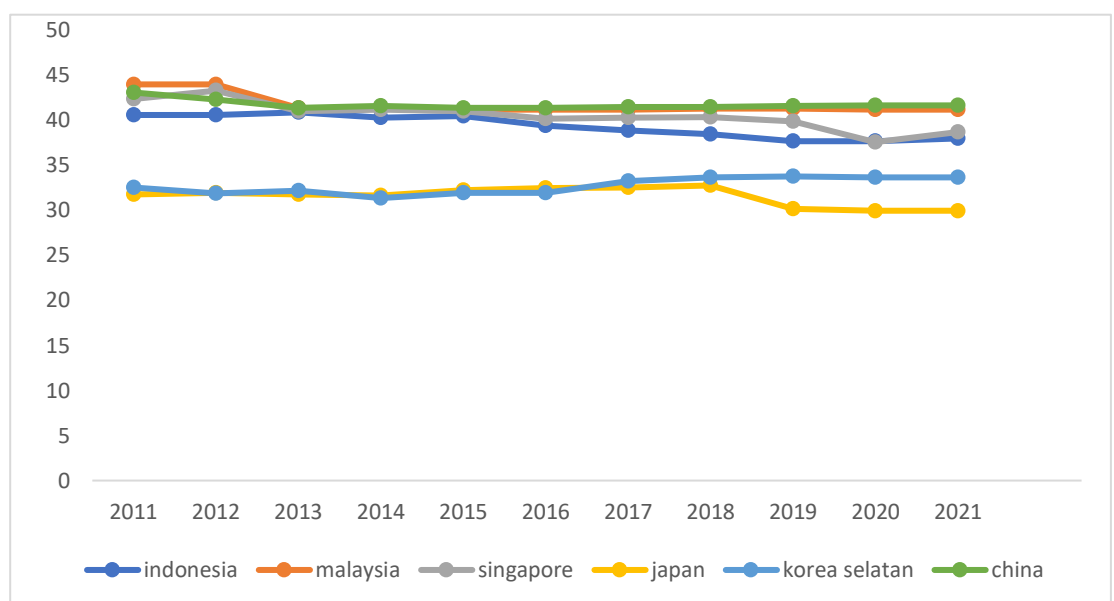
1.1 Latar Belakang

Distribusi pendapatan merupakan suatu konsep tentang penyebaran pendapatan antara individu dengan lainnya atau antar rumah tangga dalam masyarakat. Distribusi pendapatan menjadi salah satu aspek penting sebagai ukuran pemerataan pendapatan masyarakat di suatu negara. Distribusi pendapatan dikatakan merata jika pendapatan dibagikan secara adil di antara semua anggota masyarakat. Sebaliknya, distribusi pendapatan dikatakan tidak merata jika sebagian besar pendapatan dikonsentrasikan pada sekelompok kecil masyarakat saja. Maka hal tersebut berdampak pada ketimpangan pendapatan.

Ketimpangan pendapatan merupakan salah satu permasalahan kompleks ekonomi yang memiliki kaitan dengan kemiskinan. Adanya ketimpangan pendapatan menciptakan gap yang lebar antar kelompok masyarakat miskin dengan masyarakat berpenghasilan tinggi karena adanya distribusi pendapatan yang tidak merata yang terjadi dalam suatu negara. Ketimpangan pendapatan sering muncul di negara berkembang maupun negara maju. Hal tersebut dikarenakan distribusi pendapatan hanya dinikmati oleh beberapa persen populasi teratas yang dalam artian peningngakan ekonomi hanya dinikmati oleh orang kaya. Hal ini mendorong adanya sebuah ironi yang memperbesar gap antar kedua kelompok dan menjadikan individu berpenghasilan tinggi akan melipatgandakan pendapatannya dan membiarkan membiarkan individu berpenghasilan rendah akan semakin terpuruk.

Pengurangan ketimpangan menjadi salah satu target dari *Sustainable Development Goals* yang menjadi tujuan ke 10 dalam laporan PBB dan telah ditandatangani dan di sepakati oleh 193 negara anggota PBB. Hal tersebut mengindikasikan bahwa ketimpangan masih menjadi perhatian dan masalah besar yang dihadapi oleh negara berkembang. Ketimpangan pendapatan adalah faktor potensial inefisiensi ekonomi dan pemicu banyak masalah sosial seperti penyuapan, dan kronisme karena kekuasaan yang terlalu tinggi dipegang oleh bagian terkaya dari populasi di suatu negara (Sari & Falianty, 2021)

ASEAN 6 merupakan 6 negara utama di kawasan ASEAN yang terdiri dari Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, dan Vietnam. Keenam negara ini merupakan negara-negara yang paling berkembang di ASEAN dengan perekonomian terbesar. Mereka juga merupakan negara-negara pendiri ASEAN.



Gambar 1. 1 Data Ketimpangan Pendapatan 6 Negara ASEAN

Sumber : *world bank*

Berdasarkan gambar 1.1. menggambarkan ketimpangan pendapatan

di negara di asia yang diukur dengan indeks gini. Tingkat ketimpangan negara di indonesia terendah 37.9 tertinggi 40.5, pada asean lainnya yaitu malaysia terendah 41.1 sedangkan tertinggi 43.9, pada negara singapura terendah 37.5 tertinggi 43.9. lalu pada negara asia seperti jepang memiliki tingkat ketimpangan pendapatan terendah 29.9 tertinggi 31.7 dan pada negara korea selatan terendah 31.8 tertinggi 33.6 maka dari itu tingkat ketimpangan di negara kawasa ASEAN masih cukup tinggi dibandingkan negara di ASIA. .

Ketimpangan pendapatan di kawasan ASEAN-6 yang masih cukup tinggi. Berdampak pada akses masyarakat terhadap layanan keuangan, misalnya orang dengan pendapatan tinggi seringkali mudah mengakses layanan keuangan seperti pinjaman, kartu kredit, dan rekening bank. Kelompok berpenghasilan tinggi dapat mengakses ke berbagai layanan investasi dan strategi pajak. Di sisi lain, kelompok berpenghasilan rendah sulit mengakses layanan keuangan. Hal ini dapat membatasi kemampuan masyarakat berpenghasilan rendah untuk meningkatkan pendapatan atau memanfaatkan investasi yang ada. Oleh karena itu, inklusi keuangan juga mempengaruhi tingkat ketimpangan pendapatan.

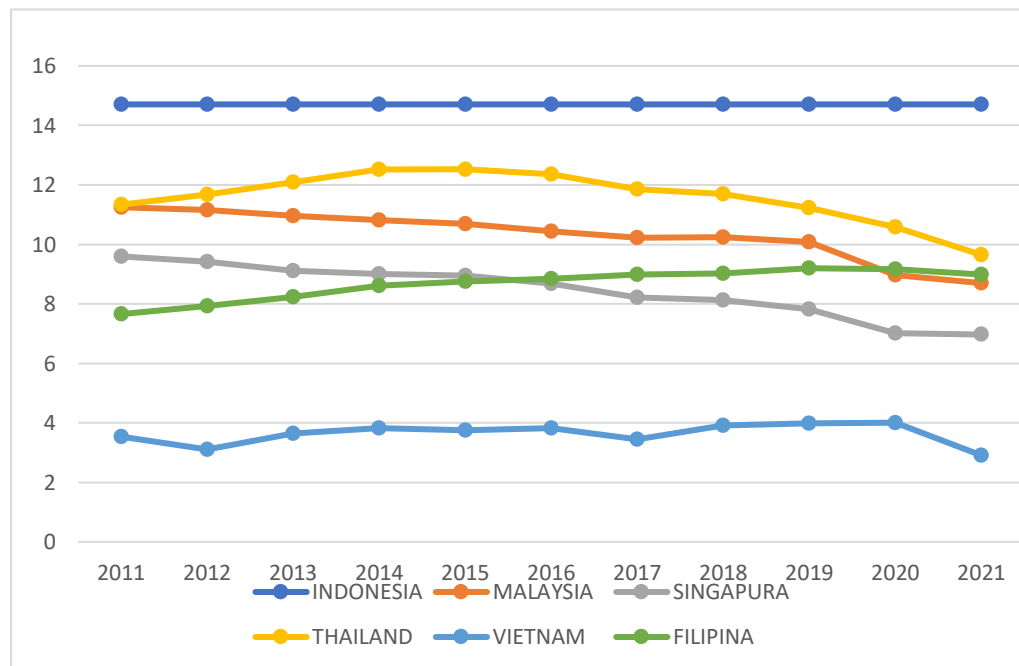
Inklusi keuangan penting bagi masyarakat *unbanked* karena inklusi keuangan merupakan salah satu bentuk kemudahan akses layanan perbankan seperti tabungan dan kredit (Morgan & Pontines, 2014). Akses memberikan peluang bagi seluruh lapisan masyarakat untuk memperoleh jasa keuangan, dan banyak negara berkembang, termasuk kawasan ASEAN sedang gencar mengembangkan industri keuangannya. Memberikan manfaat layanan keuangan kepada masyarakat miskin melalui tabungan,

budaya menabung, dan penciptaan mekanisme pembayaran berbiaya rendah yang efisien (Dixit & Ghosh, 2013).

Inklusi keuangan didefinisikan mengacu pada proses yang menjamin kemudahan akses, ketersediaan dan penggunaan sistem keuangan formal untuk semua anggota ekonomi. Peningkatan inklusi keuangan akan diikuti oleh basis tabungan yang dapat digunakan meningkatkan proses intermediasi. Melalui peningkatan akses keuangan dapat memperluas pilihan masyarakat untuk meningkatkan produktifitas sebagai pelaku ekonomi (Sarma, 2012).

Perkembangan keuangan inklusif memberikan dampak manfaat yang dapat dirasakan oleh semua kalangan. Inklusi keuangan dapat memberikan dampak langsung kalangan atau individu dalam akses layanan keuangan sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup seperti transaksi, pembayaran, tabungan, kredit dan asuransi secara bertanggung jawab dan berkelanjutan. Hal tersebut jika terwujud akan membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya dengan lebih dan menciptakan kesejahteraan masyarakat dan berkurangnya kemiskinan. Pentingnya inklusi keuangan dalam mengatasi ketimpangan perlu diikuti oleh ketercapaian inklusi keuangan yang baik.

Perkembangan inklusi keuangan dapat ditandai oleh Aksesibilitas Layanan Keuangan. Inklusi keuangan berarti memberikan akses ke layanan keuangan yang terjangkau dan mudah diakses bagi seluruh lapisan masyarakat. Perkembangan inklusi keuangan mencakup peningkatan akses terhadap produk dan layanan keuangan. Aksesibilitas layanan keuangan dapat dilihat melalui pertumbuhan jumlah kantor cabang bank umum maupun jumlah pengguna kartu rekening.



Gambar 1. 2 jumlah Cabang bank umum per 1,000 orang dewasa di ASEAN-6
 Sumber : *financial acces survey, IMF*

Menurut Sarma (2012) *Indeks Financial Inclusion* digunakan untuk mengukur tingkat inklusi keuangan dengan menggunakan data 3 dimensi yaitu penetrasi perbankan, ketersediaan layanan perbankan dan penggunaan. Berdasarkan gambar 1.2 inklusi keuangan yang di ukur melalui jumlah bank umum per 1.000 orang dewasa. Dalam 10 tahun terakhir perkembangan cabang bank umum memiliki trend fluktuatif. Berbeda dengan indonesia yang perkembangan bank umumnya masih stabil dalam 10 tahun terakhir.

Inklusi keuangan menjadi salah satu faktor dalam meningkatkan kemakmuran yang ditandai dengan adanya kebijakan pada beberapa negara berkembang, seperti pembentukan unit inklusi keuangan serta target inklusi keuangan spesifik. Indikator inklusi keuangan G-20 disusun untuk menilai

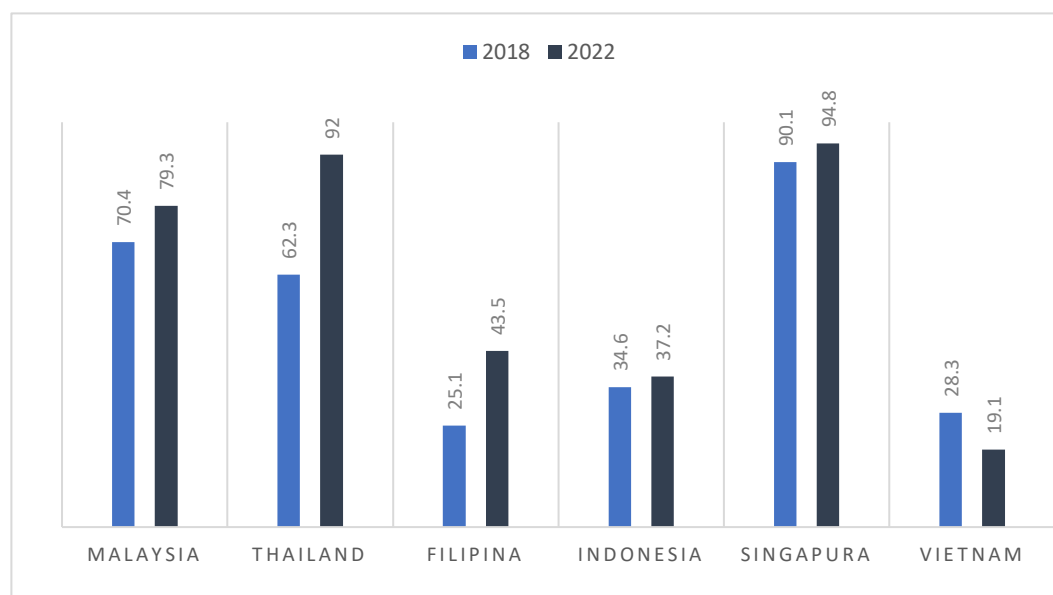
keadaan inklusi keuangan dan layanan keuangan digital yang bertujuan untuk mendukung negara-negara dalam mencapai tujuan inklusi keuangan mereka. Pada tingkat negara, sekitar dua per tiga dari peraturan dan pengawasan lembaga-lembaga sekarang dibebankan dengan peningkatan inklusi keuangan.

Penerapan inklusi keuangan yang telah diadopsi oleh berbagai negara di dunia bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui akses pelayanan dasar dalam sektor keuangan. Secara tidak langsung, inklusi keuangan ini ditujukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif melalui pengurangan kemiskinan, pemerataan pendapatan, peningkatan pembangunan, dan stabilitas sistem keuangan (Bank Indonesia, 2014). Pertumbuhan Ekonomi yang tinggi belum tentu diikuti oleh tingkat kesejahteraan masyarakat. Permasalahan terkait kemiskinan dan ketimpangan pendapatan masih menjadi hal yang tidak dapat dihindari oleh berbagai negara, sekalipun negara dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Indikator inklusi keuangan G20 disusun untuk menilai keadaan inklusi keuangan dan layanan keuangan digital yang bertujuan untuk mendukung negara-negara dalam mencapai inklusi keuangannya. Kebijakan di tingkat negara telah menetapkan dua per tiga peraturan dan pengawasan lembaga keuangan ditujukan untuk meningkatkan inklusi keuangan, sehingga beberapa tahun terakhir 50 negara sudah menetapkan sasaran formal untuk inklusi keuangan termasuk diantaranya negara di ASEAN-6, dimana diduga inklusi keuangan dapat mempengaruhi kemiskinan dan ketimpangan pendapatan.

Inklusi keuangan dapat memanfaatkan fintech dalam kehidupan sehari, misalnya kemudahan pembayaran menggunakan dompet digital maupun uang elektronik ataupun *QRIS* dalam transaksi jual beli barang atau jasa. Jika masyarakat di negara berkembang dapat mengakses layanan keuangan, maka akan mendapatkan peluang untuk mengembangkan bisnisnya melalui *e commerce*.

Teknologi finansial juga dapat menurunkan biaya transaksi untuk pembiayaan pihak ketiga melalui investasi dan pinjaman *peer-to-peer*, sehingga teknologi finansial dapat membuat kredit lebih mudah dan lebih murah untuk usaha kecil. Hal ini berdampak positif bagi inovasi keuangan dan pertumbuhan ekonomi,



Gambar 1. 3 pembayaran digital di ASEAN (Dalam %)

Sumber: Global Findex Database

Bedasarkan gambar 1.3 memberikan gambaran indikator pembayaran digital yang di ukur melalui penduduk dewasa 15 tahun keatas di negara ASEAN-6 melakukan dan menerima pembayaran digital. Data

Singapura, Thailand Dan Malaysia termasuk tinggi dalam pemanfaatan teknologi keuangan. Berbeda dengan 3 negara asean lainnya yang masih berada jauh di bawahnya yang disebabkan adanya kesenjangan antar negara berdasarkan akses internet. Kondisi bertambah parah akibat kesenjangan dalam negara, terutama daerah perkotaan, pinggiran, dan perbedaan model pendidikan.

Inklusi keuangan di ASEAN telah berkembang pesat selama beberapa tahun terakhir, dikarenakan makin banyaknya produk keuangan tersedia bagi berbagai kelompok masyarakat di wilayah ASEAN. Para pelaku usaha kecil, termasuk petani, nelayan, dan pekerja informal, telah dimanfaatkan dengan produk pinjaman pembiayaan mikro, kewajiban pertanggungjawaban sosial yang diyakini, layanan pembayaran digital, dan berbagai solusi keuangan lainnya. Pemerintah melakukan berbagai intervensi untuk memperluas akses ke produk ini dan meningkatkan pemahaman mengenai produk keuangan yang tersedia.

World bank menyatakan bahwa sebenarnya ada potensi besar yang belum tergali agar ekonomi digital tumbuh lebih cepat di asean. Tentunya itu tidak semua tidak lepas dari peran pemerintah masing masing negara dalam menyediakan sistem atau layanan yang mendukung pertumbuhan ekonomi digital. perkembangan financial technology melalui pembayaran digital merupakan pendorong inklusi keuangan. Pembayaran biasanya merupakan pintu masuk dalam penggunaan layanan keuangan oleh mereka yang sebelumnya di kecualikan. saluran pembayaran digital berpotensi memberdayakan mereka yang tidak memiliki akses ke layanan perbankan untuk mengakses layanan keuangan formal lainnya.

Beberapa kajian yang meneliti pengaruh fintech dan inklusi keuangan terhadap ketimpangan pendapatan dengan berbagai perbedaan hasil diantaranya (Ashenafi, 2022) ada *tradeoff* antara inklusi keuangan, Fintech, dan ketimpangan pendapatan. Lembaga keuangan berfungsi sebagai instrumen yang baik untuk mempersempit ketimpangan pendapatan. Keuangan, jika dikelola dengan tepat, dapat meningkatkan pendapatan per kapita, mengentaskan kemiskinan, dan mempersempit ketimpangan. dengan hal tersebut senada dengan dikemukakan oleh (Omar & Inaba, 2020) adanya hubungan negatif yang sangat signifikan antara inklusi keuangan dan ketimpangan pendapatan di seluruh model. Ini menyiratkan bahwa inklusi keuangan yang lebih tinggi efektif dalam mengurangi ketimpangan pendapatan di negara-negara berkembang.

Selain inklusi keuangan dan teknologi finansial tingkat ketimpangan yang masih cukup tinggi di beberapa negara ASEAN juga di pengaruhi beberapa faktor lain seperti jumlah penduduk, pertumbuhan penduduk yang cukup signifikan dapat mempengaruhi secara baik dalam sektor ekonomi melalui meningkatkannya konsumsi barang dan jasa secara makroekonomi, namun pertumbuhan penduduk yang tinggi dapat memperparah ketimpangan pendapatan. Dikarenakan jika pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi namun tidak mendapatkan kualitas pendidikan tinggi maka terjadi ketimpangan pendapatan yang tinggi. Pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi dapat menimbulkan kesenjangan pendapatan antar kelompok yang berpenghasilan rendah dan berpenghasilan tinggi dalam memperoleh pendapatan. Jika suatu ingin mendapatkan pendapatan yang lebih akan meningkatkan kualitas manusiannya. Kualitas manusia terciptakan melalui

pendidikan. Dalam hal ini Pendidikan memiliki peranan penting dalam distribusi pendapatan. Suatu kelompok yang memiliki pendidikan lebih tinggi dapat memiliki peluang untuk akses layanan kesuungan dan investasi sehingga mendapatkan banyak pendapatan, maka dari itu pendidikan berpengaruh secara negatif dalam mengurangi tingkat ketimpangan pendapatan di suatu wilayah(A. R. Sari & Saraswati, 2019).

Bedasarkan penelitian yang dilakukan oleh Saraswati et al., (2020) inklusi keuangan berpengaruh secara negatif terhadap ketimpangan pendapatan di ASIA. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ali et al.,(2021) bahwa inklusi keuangan berpengaruh negatif terhadap tingkat ketimpangan pendapatan di 18 negara ASIA, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Ashenafi (2022) bahwa *financiaal technology* dapat meningkatkan inklusi keuangan, tetapi *financial technology* juga memperparah tingkat ketimangan pendapatan di negara Afrika. Penelitian ini di fokuskan di negara asean-6 yang merupakan negara dengan perekonomian terbesar di kawasan ASEAN, selain itu memberikan perspektif baru dan gambaran perkembangan inklusi keuangan dan financial technology di ASEAN-6. Sehingga penelitian ini berkontribusi untuk menyempurnakan penelitian sebelumnya terkait pengaruh financial technology dan inklusi keuangan terhadap ketimpangan pendapatan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang penelitian tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah teknologi finansial berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di ASEAN-6

2. apakah inklusi keuangan berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di ASEAN-6

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, penelitian ini bertujuan untuk:

3. Menganalisis dan mengidentifikasi pengaruh teknologi finansial terhadap ketimpangan pendapatan di ASEAN-6
4. Menganalisis dan mengidentifikasi pengaruh inklusi keuangan terhadap ketimpangan pendapatan di ASEAN-6

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran pemahaman mengenai pengaruh teknologi finansial dan inklusi keuangan terhadap ketimpangan pendapatan di ASEAN-6.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Memberikan masukan dan informasi bagi pemangku kebijakan tentang ketimpangan pendapatan di ASEAN-6.
- b. Dapat menjadi rujukan penelitian bagi penulis selanjutnya yang meneliti topik teknologi finansial, inklusi keuangan dan ketimpangan pendapatan.